
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI SULAWESI SELATAN 2020

ISBN : 9786236203521
No. Publikasi : 73000.2163
Katalog : 4601006.73
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : viii + 24 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Diterbitkan dan Dicitak Oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

**INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2020**

Pengarah
Sunto

Penyusun/Penulis
Ayub Parlin Ampulembang

Editor
Is Anjar Wulandari

Desain Sampul
Ayub Parlin Ampulembang



KATA PENGANTAR

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009 atas kerja sama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). IDI pertama kali dikembangkan pada tahun 2007 diprakarsai Bappenas dan UNDP sebagai embrio pengukuran kinerja demokrasi. Mulai tahun 2009 hingga 2020 IDI dihitung dengan konsep dan metodologi yang sama sehingga dapat bermakna sebagai perubahan antar waktu.

IDI Provinsi Sulawesi Selatan merupakan indeks yang dapat memberikan gambaran tentang realita kondisi demokrasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penyusunan IDI Provinsi yang dilakukan setiap tahun ditujukan untuk memberi manfaat bagi perencanaan pembangunan bidang politik pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan



SUNTONO



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | v |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Gambar | vii |
| 1. Pendahuluan | 1 |
| 2. Metodologi | 3 |
| 3. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2020 | 7 |
| 4. Infografis Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2020 | 23 |

<https://sulsel.bps.go.id>





DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 2.1. Aspek dan Indikator IDI 2020 | 5 |
| Tabel 3.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Variabel Tahun 2019-2020 | 12 |

<https://sulsel.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----------|
| Gambar 2.1. Alur Penyusunan IDI 2020 | 4 |
| Gambar 3.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 | 8 |
| Gambar 3.2. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2014 – 2020 | 10 |
| Gambar 3.3. Indeks Demokrasi Indonesia Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 | 11 |
| Gambar 3.4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2019 – 2020 | 13 |
| Gambar 3.5. Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 | 18 |

<https://sisul-bps.go.id>



1. PENDAHULUAN

<https://sulsebooks.go.id>





PENDAHULUAN

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Dalam penyusunan IDI ini, aspek demokrasi tersebut adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah variabel dan indikator.

IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari hasil tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang diteliti. Dengan demikian, pengukuran ini akan menghasilkan perbandingan perkembangan demokrasi antar provinsi. Hasil akan bermanfaat untuk beberapa hal, *pertama*, hasil dari pengukuran IDI dapat membantu para akademisi mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. *Kedua*, bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi, khususnya pada aspek atau variabel atau indikator yang masih kurang.

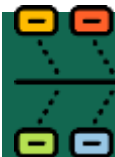
Data IDI mengacu pada tingkat provinsi karena data yang dikumpulkan merupakan data di tingkat provinsi, dan bukan pada tingkat nasional. Oleh karena itu kata “Indonesia” mengacu pada rata-rata nilai provinsi di Indonesia. Tentu saja perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi berbeda dari perkembangan demokrasi pada tingkat nasional. IDI pada tingkat nasional harus menggunakan data pemerintah pusat di Jakarta dan rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai sumber data, sedangkan IDI yang disusun pada tingkat provinsi menggunakan data pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut serta rakyat di provinsi bersangkutan sebagai sumber data.

2. METODOLOGI

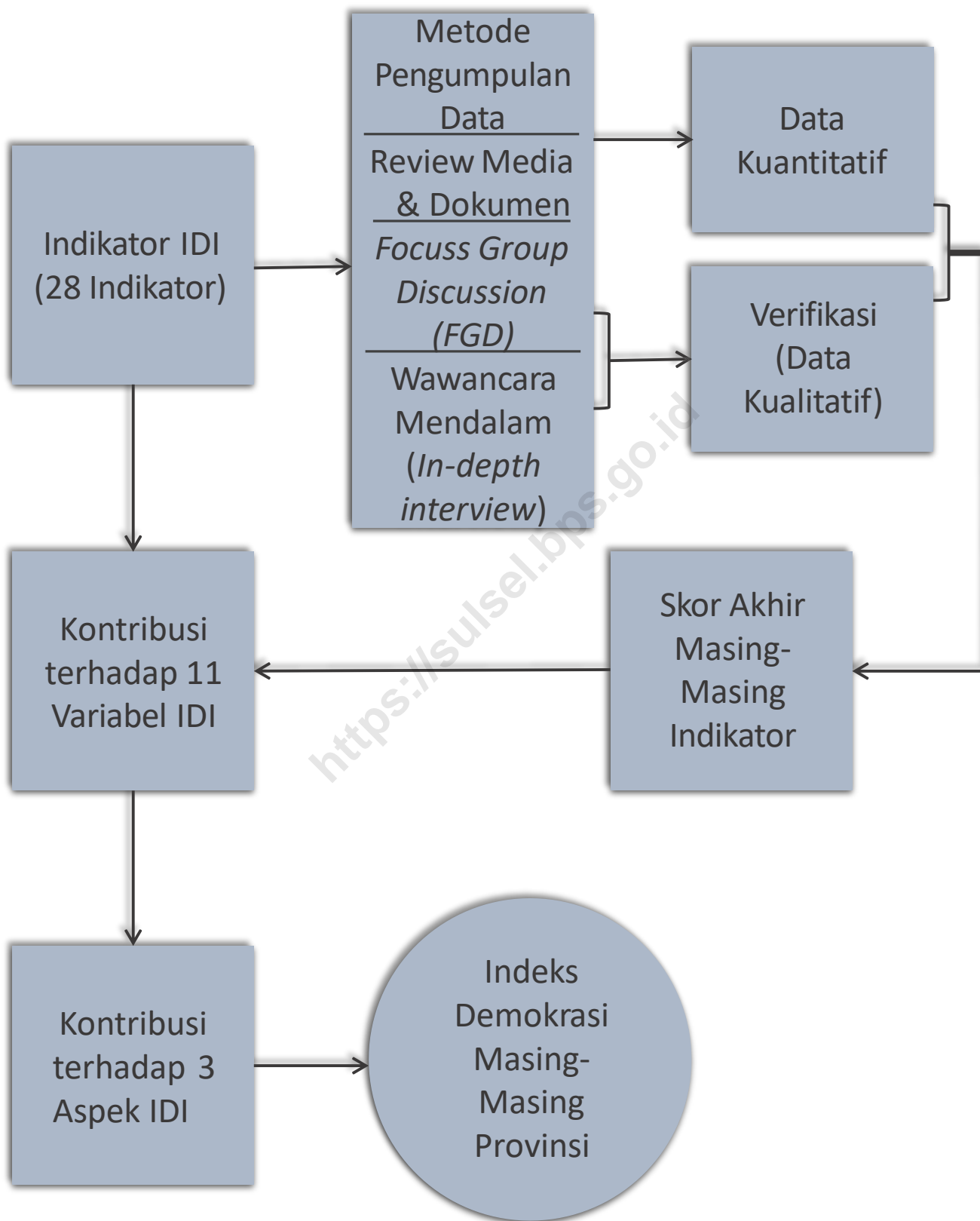
2. METODOLOGI

<https://sulsulops.go.id>





Gambar 2.1. Alur Penyusunan IDI 2020





Tabel 2.1. Aspek dan Indikator IDI 2020

| No | Aspek/Variabel/Indikator |
|--|---|
| A. KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) | |
| I. Kebebasan berkumpul dan berserikat | |
| 1 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat |
| 2 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat |
| II. Kebebasan berpendapat | |
| 3 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat |
| 4 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat |
| III. Kebebasan berkeyakinan | |
| 5 | Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya |
| 6 | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya |
| 7 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama |
| IV. Kebebasan dari diskriminasi | |
| 8 | Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya |
| 9 | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya |
| 10 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya |





Tabel 2.1. Aspek dan Indikator IDI 2020

| No | Aspek/Variabel/Indikator |
|---|--|
| B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) | |
| V. Hak memilih dan dipilih | |
| 11 | Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat |
| 12 | Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih |
| 13 | Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) |
| 14 | Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (Voters turnout) |
| 15 | Perempuan terpilih di DPRD Provinsi |
| VI. Partisipasi Politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan | |
| 16 | Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan |
| 17 | Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan |
| C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) | |
| VII. Pemilu yang bebas dan adil | |
| 18 | Kejadian yg menunjukkan keberpihakan KPUD dlm penyelenggaraan Pemilu |
| 19 | Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara |
| VIII. Peran DPRD | |
| 20 | Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan |
| 21 | Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD |
| 22 | Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif |
| IX. Peran Partai Politik | |
| 23 | Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu |
| 24 | Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi |
| X. Peran birokrasi Pemerintah Daerah | |
| 25 | Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN |
| 26 | Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah |
| XI. Peran Peradilan yang independen | |
| 27 | Keputusan hakim yang kontroversial |
| 28 | Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi |

3. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 2020

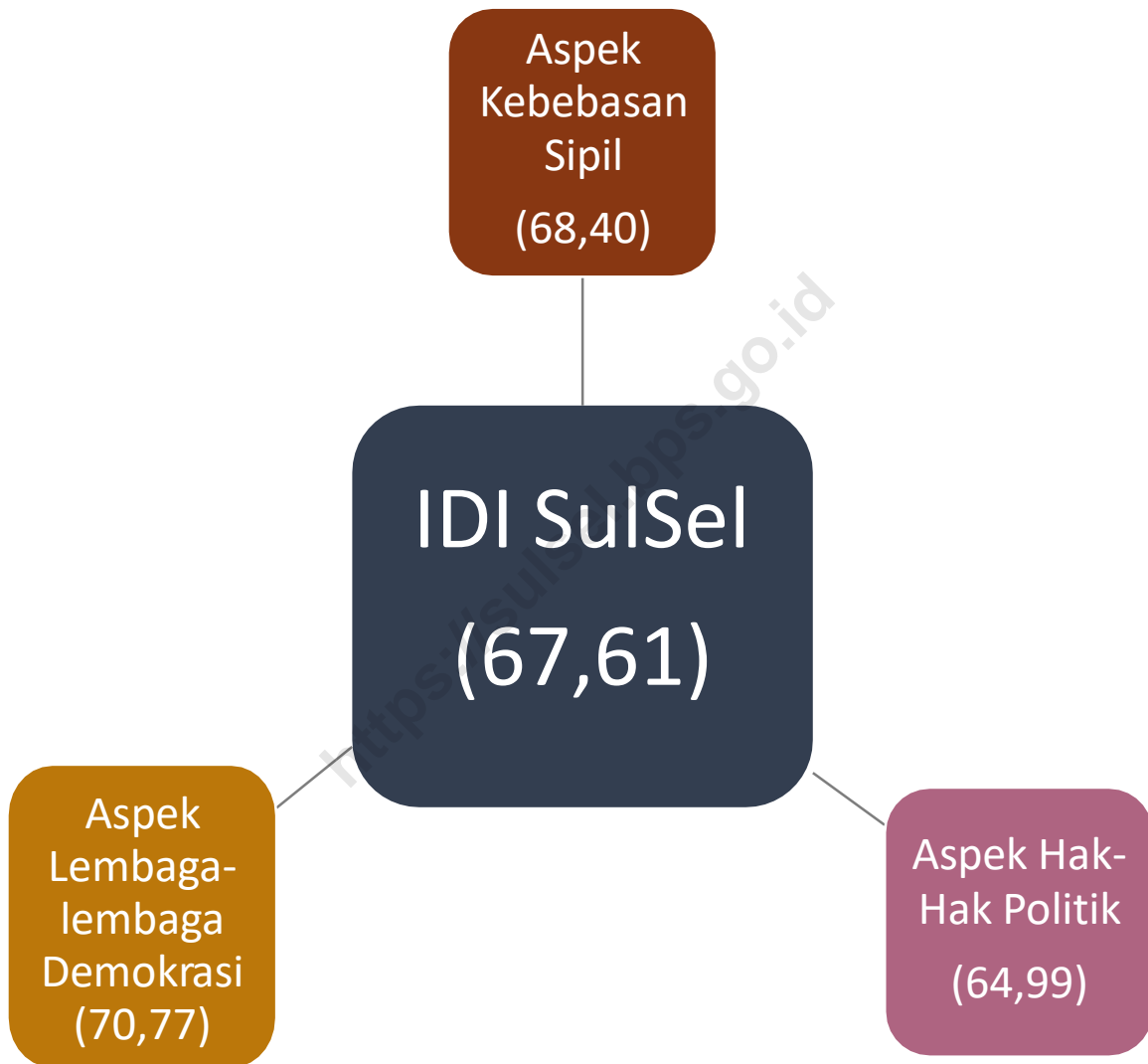
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2020

<http://sulfelibs.go.id>





Gambar 3.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020





Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Angka IDI Sulawesi Selatan 2020 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-Hak Politik, dan aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebesar **67,61** dalam skala 0 sampai 100. Angka ini turun 2,97 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi Sulawesi Selatan 2019 sebesar 70,58. Capaian kinerja demokrasi Sulawesi Selatan masih berada pada kategori “**sedang**”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

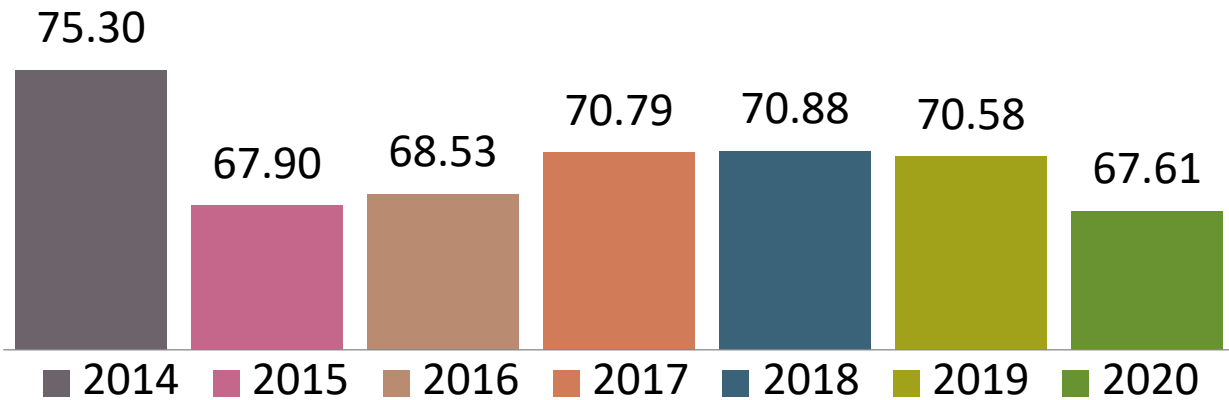
Penurunan angka IDI Sulawesi Selatan dari 2019-2020 terutama disebabkan oleh penurunan aspek Lembaga demokrasi sebesar 10,57 poin (dari 81,34 ke 70,77) dan penurunan aspek hak-hak politik sebesar 0,62 poin (dari 65,61 ke 64,99). Sedangkan aspek kebebasan sipil hanya naik tipis sebesar 0,08 poin (dari 68,32 menjadi 68,40).

Pada tahun 2020 terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan indeks, empat variabel yang mengalami penurunan, dan dua variabel yang tidak mengalami perubahan. Lima variabel yang meningkat yaitu variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, dan peran DPRD. Variabel yang mengalami penurunan adalah variabel kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, peran birokrasi pemerintah daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun variabel yang tidak mengalami perubahan adalah variabel pemilu yang bebas dan adil, dan peran partai politik.

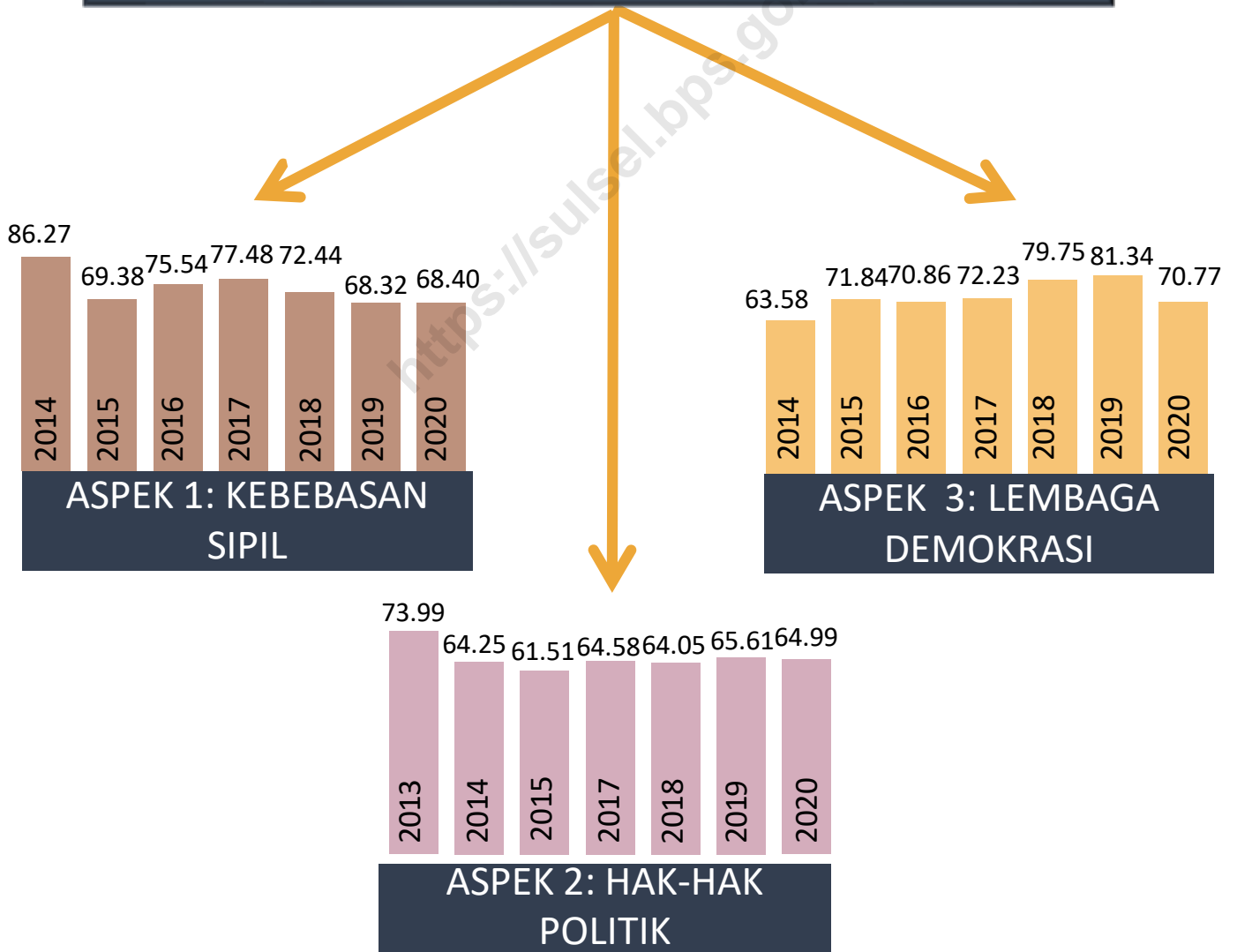
Metodologi pengumpulan data IDI terdiri dari 4 sumber data yaitu : (1) *review* surat kabar lokal, (2) *review* dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.



Gambar 3.2. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2014 - 2020

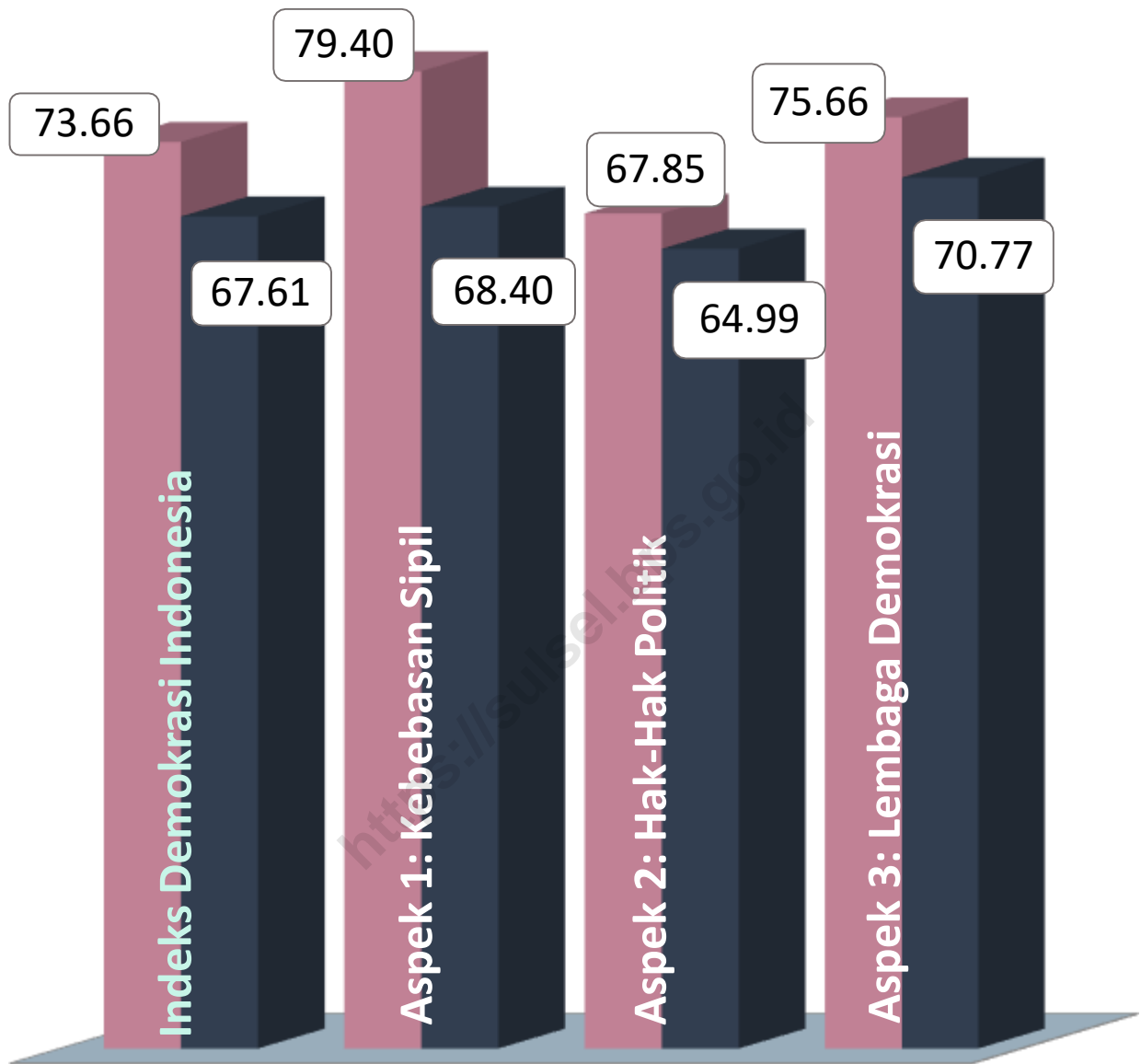


IDI PROVINSI SULAWESI SELATAN





Gambar 3.3. Indeks Demokrasi Indonesia Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020



 Nasional

 Sulawesi Selatan





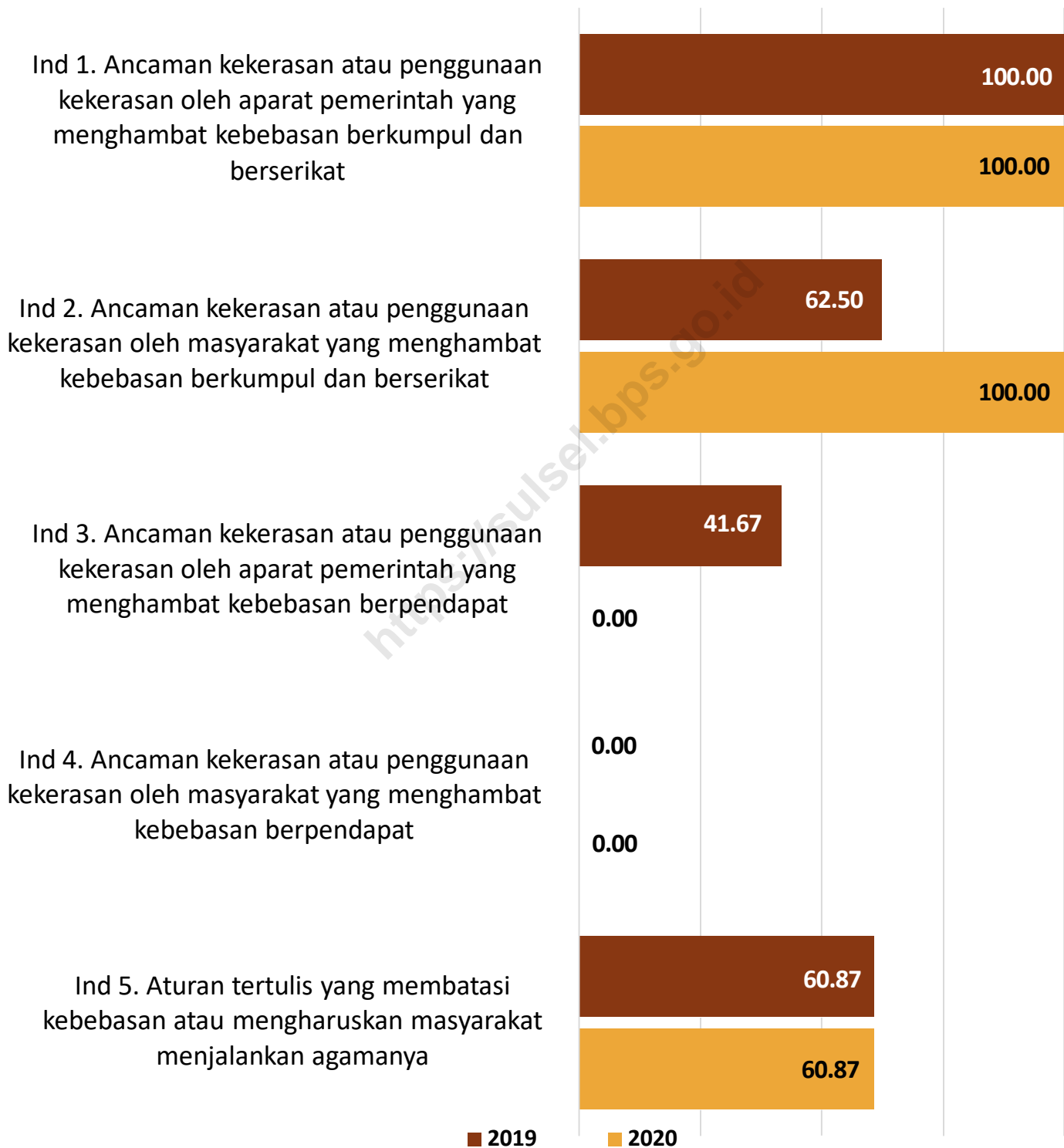
Tabel 3.1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Variabel Tahun 2018-2019

| No | Nama Variabel | 2019 | 2020 | Perubahan |
|-----|--|--------|--------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kebebasan Berkumpul dan Berserikat | 95,31 | 100,00 | 4,69 |
| 2 | Kebebasan Berpendapat | 34,71 | 0,00 | -34,71 |
| 3 | Kebebasan Berkeyakinan | 67,49 | 71,24 | 3,75 |
| 4 | Kebebasan dari Diskriminasi | 73,92 | 76,97 | 3,05 |
| 5 | Hak Memilih dan Dipilih | 81,21 | 81,78 | 0,57 |
| 6 | Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan | 50,00 | 48,21 | -1,79 |
| 7 | Pemilu yang Bebas dan Adil | 70,91 | 70,91 | 0,00 |
| 8 | Peran DPRD | 62,43 | 69,49 | 7,06 |
| 9 | Peran Partai Politik | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | Peran Birokrasi Pemerintah Daerah | 69,87 | 67,18 | -2,69 |
| 11 | Peran Peradilan yang Independen | 100,00 | 50,00 | -50,00 |



Gambar 3.4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2019-2020

KEBEBASAN SIPIL₁





Gambar 3.4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2019-2020

KEBEBASAN SIPIL₂

Ind 6. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya



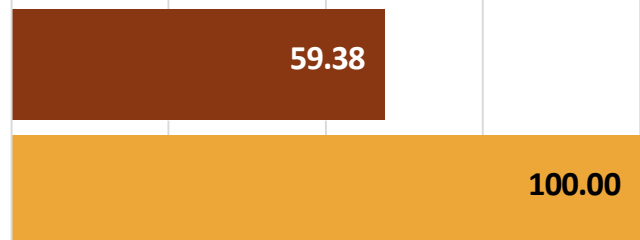
Ind 7. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama



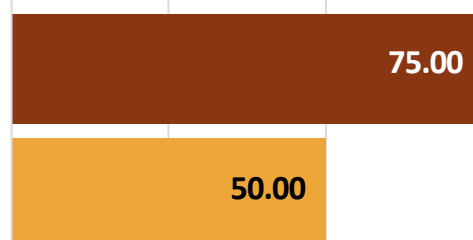
Ind 8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya



Ind 9. Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya



Ind 10. Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya



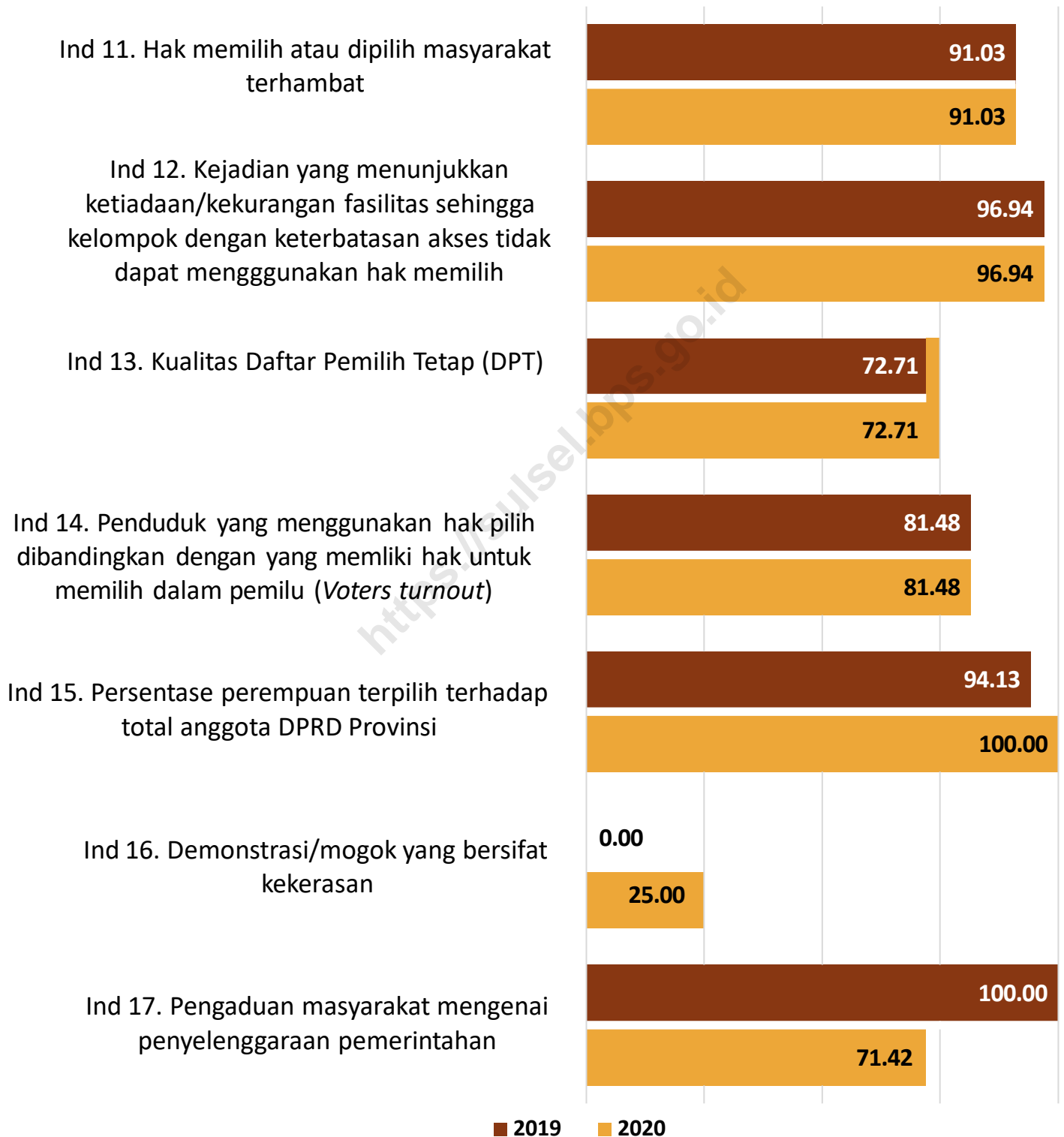
■ 2019

■ 2020



Gambar 3.4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2019-2020

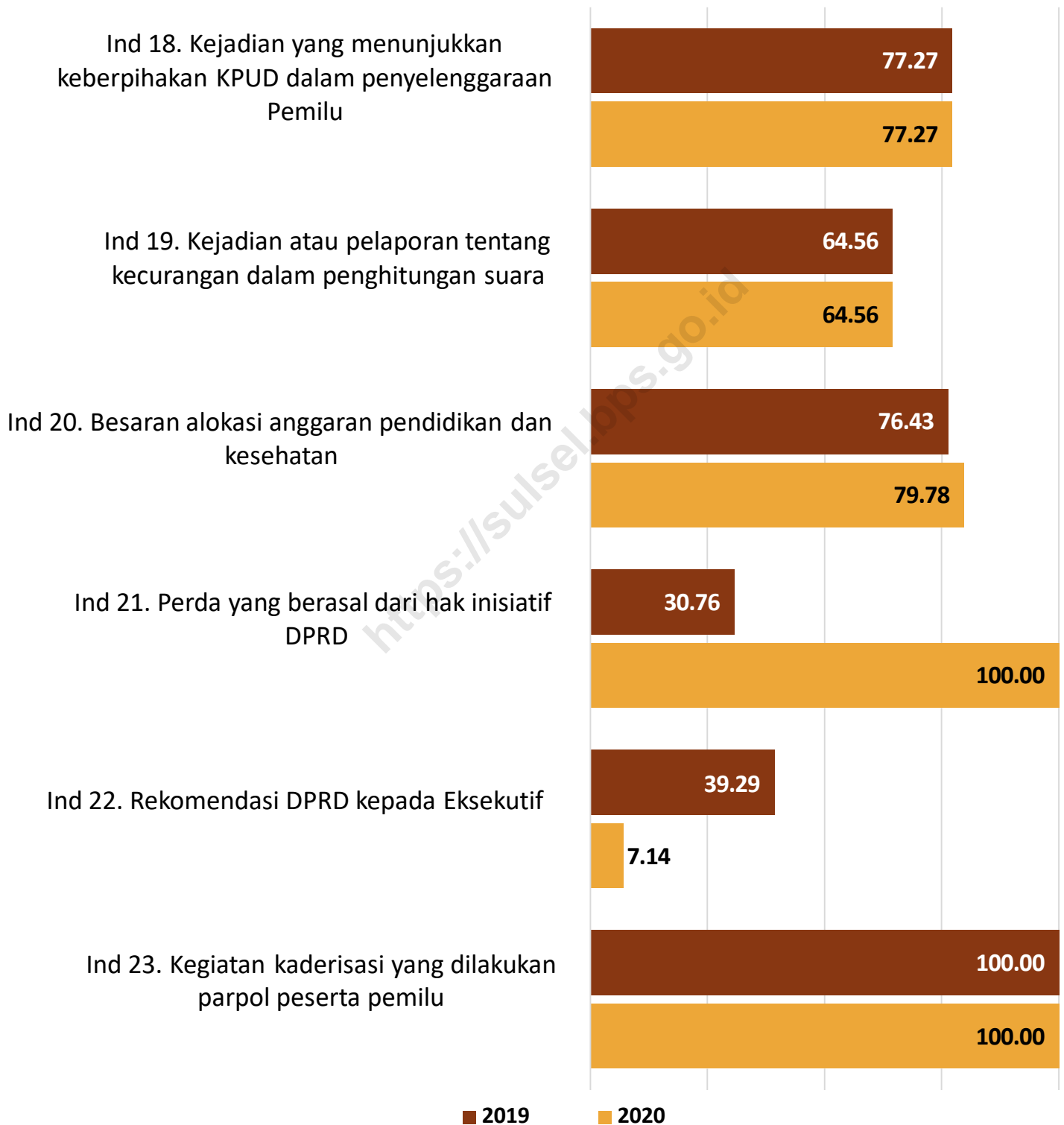
HAK-HAK POLITIK





Gambar 3.4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2019-2020

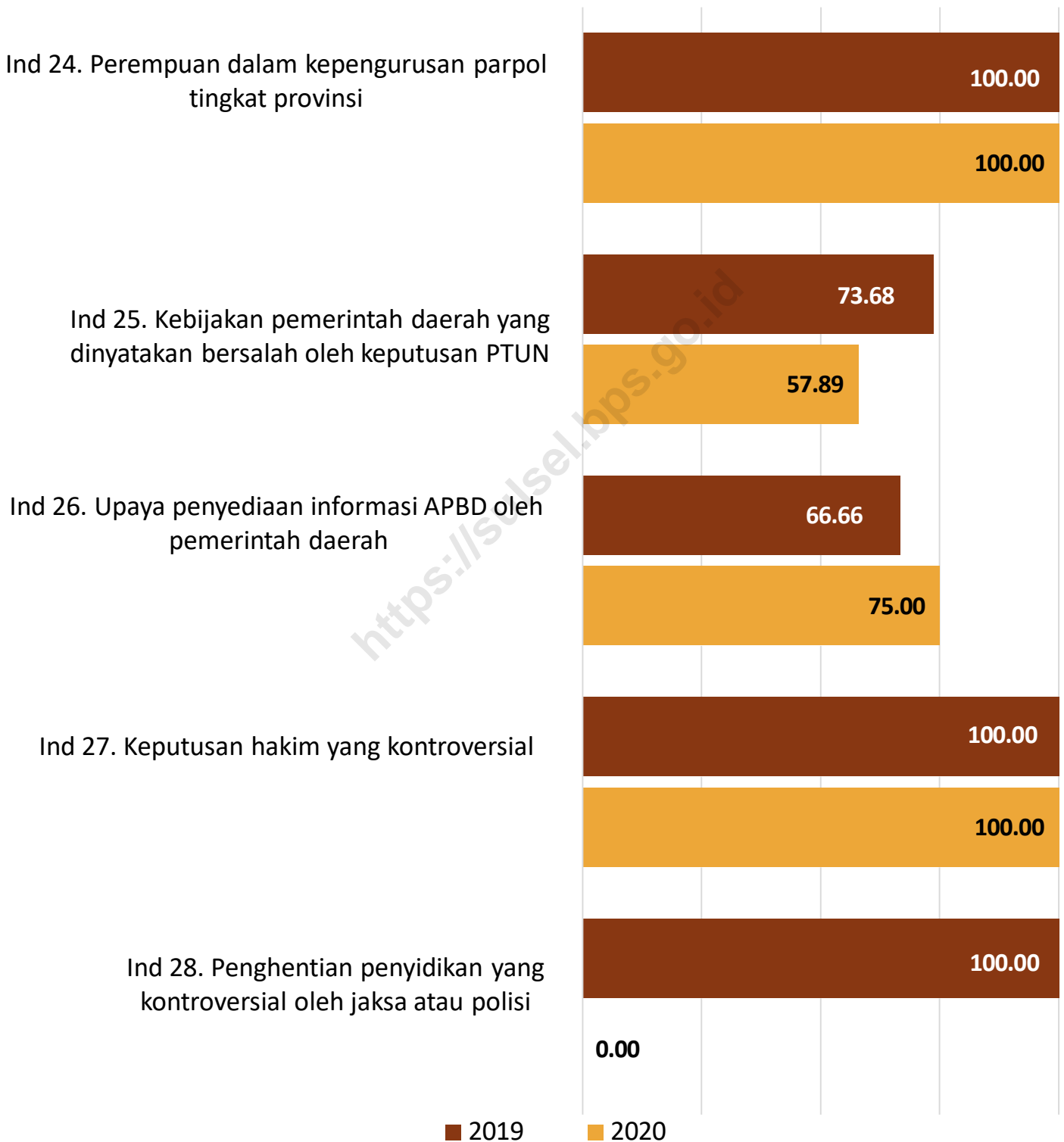
LEMBAGA DEMOKRASI₁





Gambar 3.4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Tahun 2019-2020

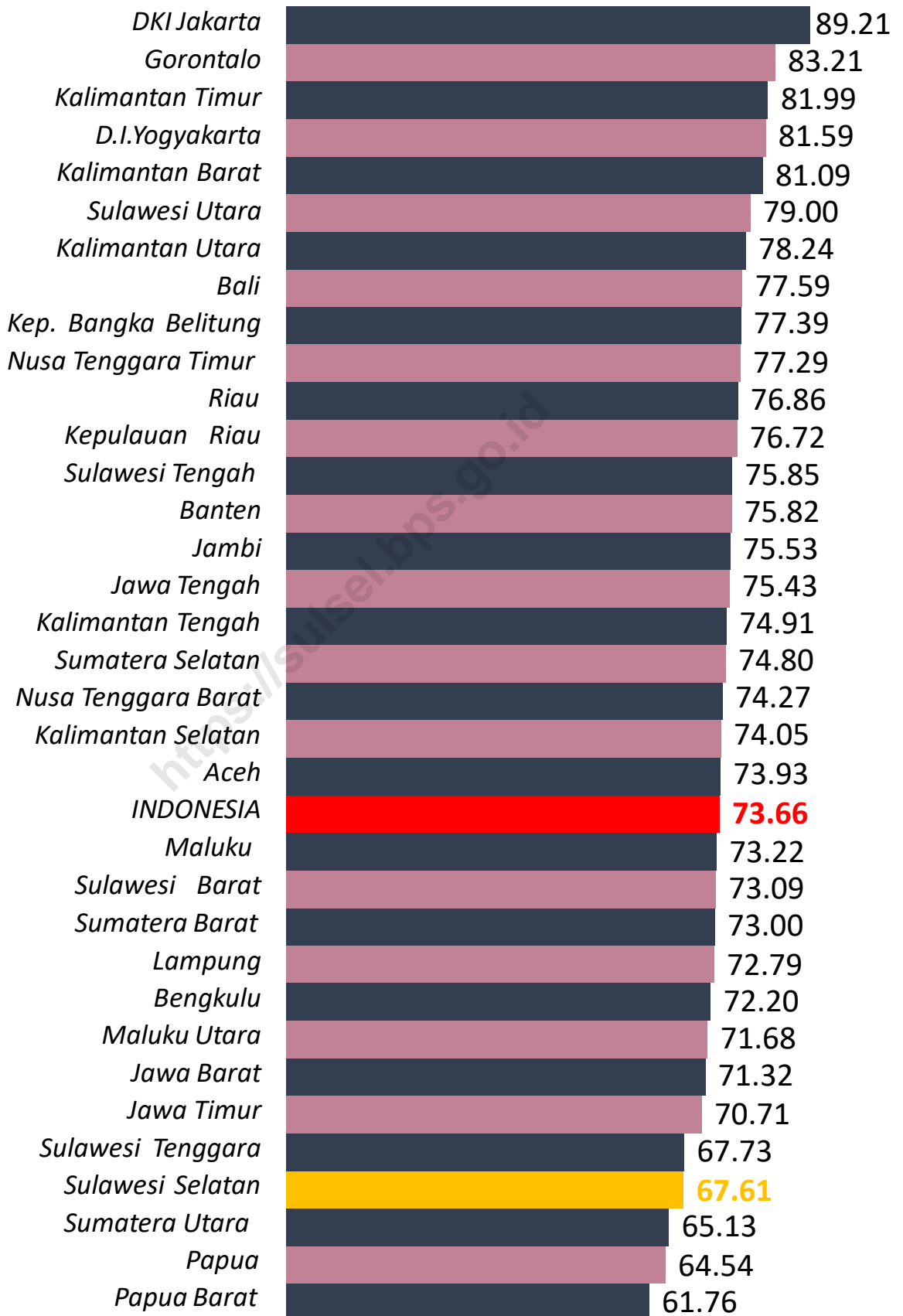
LEMBAGA DEMOKRASI₂





Gambar 3.5. Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2020

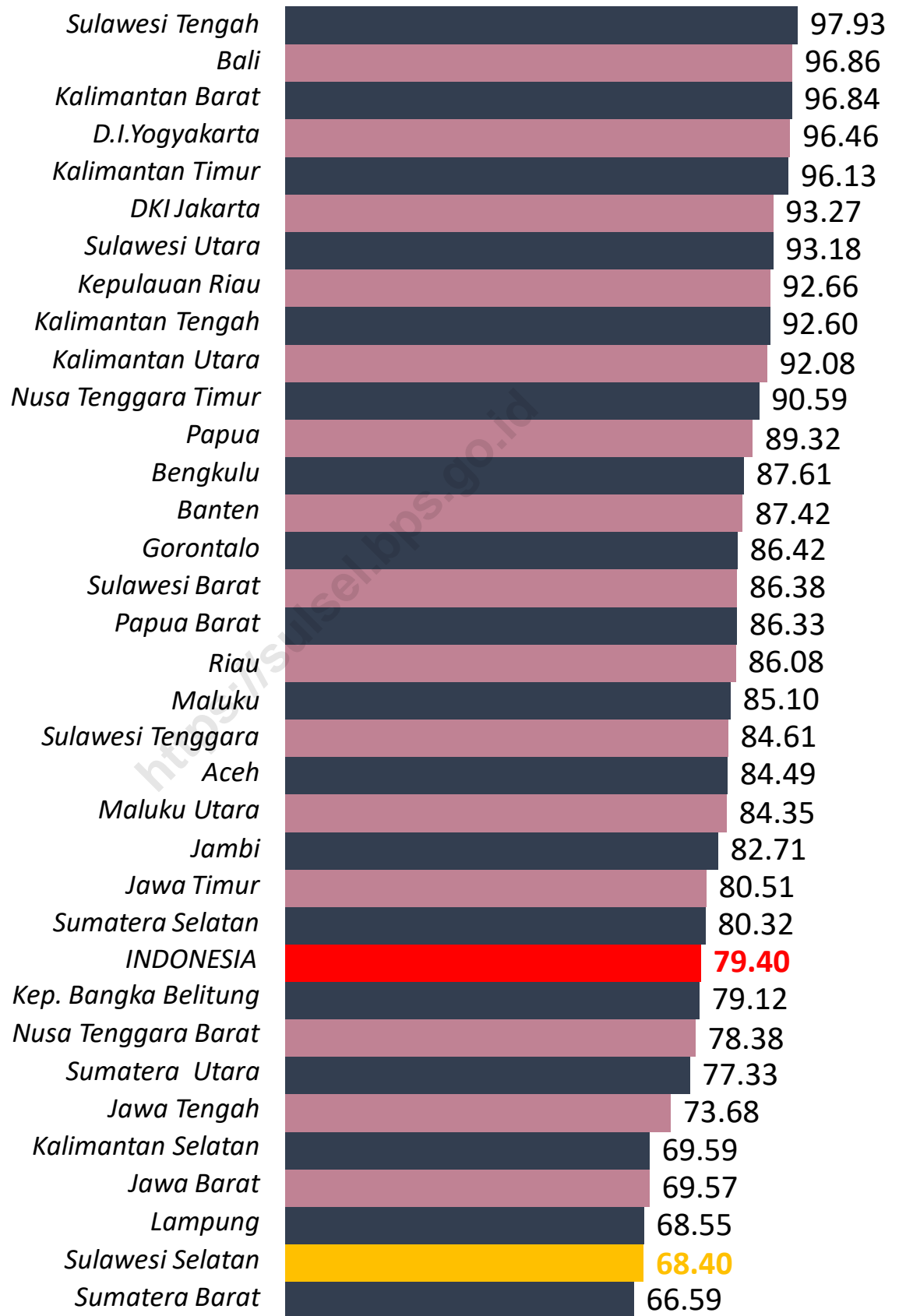
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA





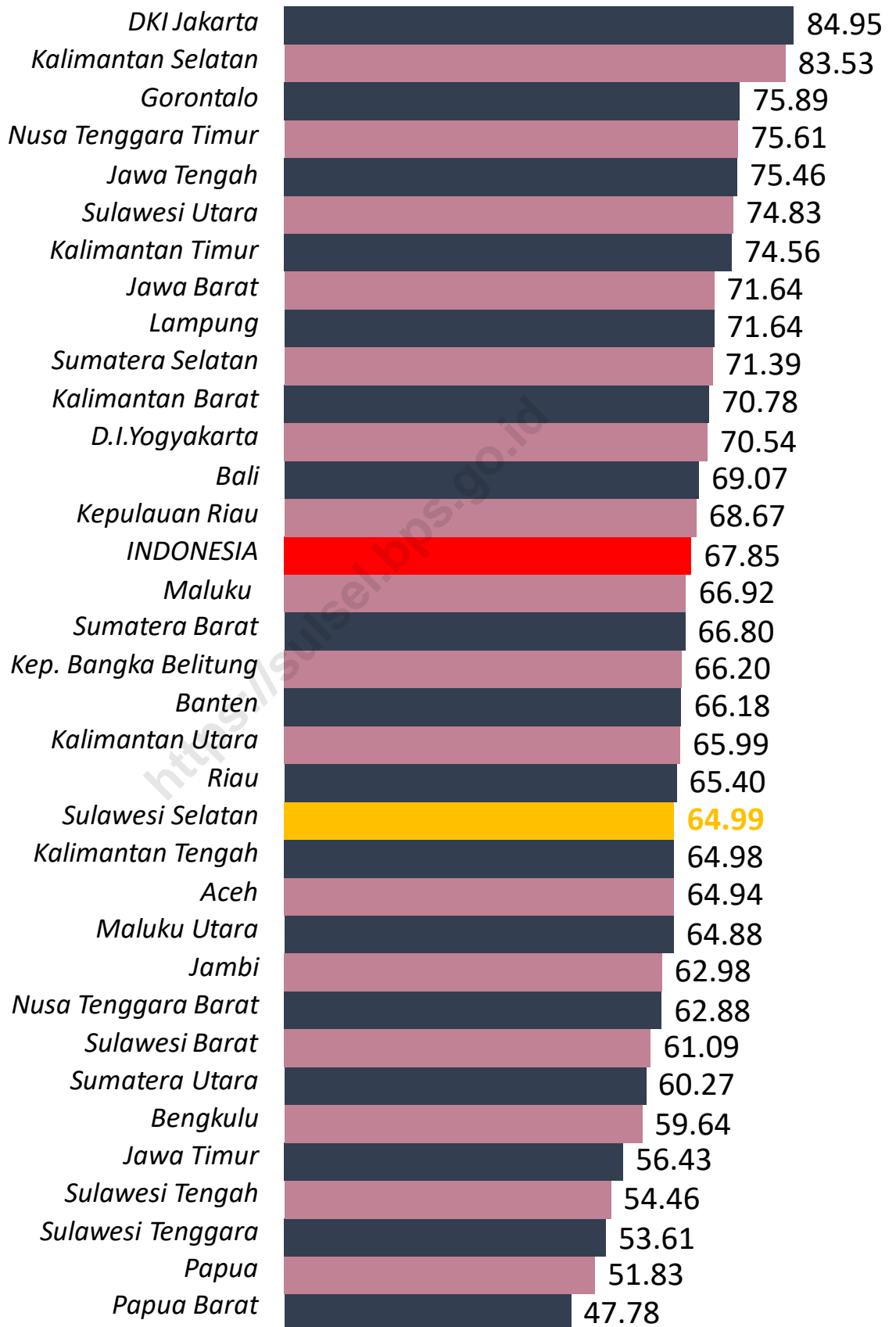
Gambar 3.5. Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2020

ASPEK 1 : KEBEBASAN SIPIL



Gambar 3.5. Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2020

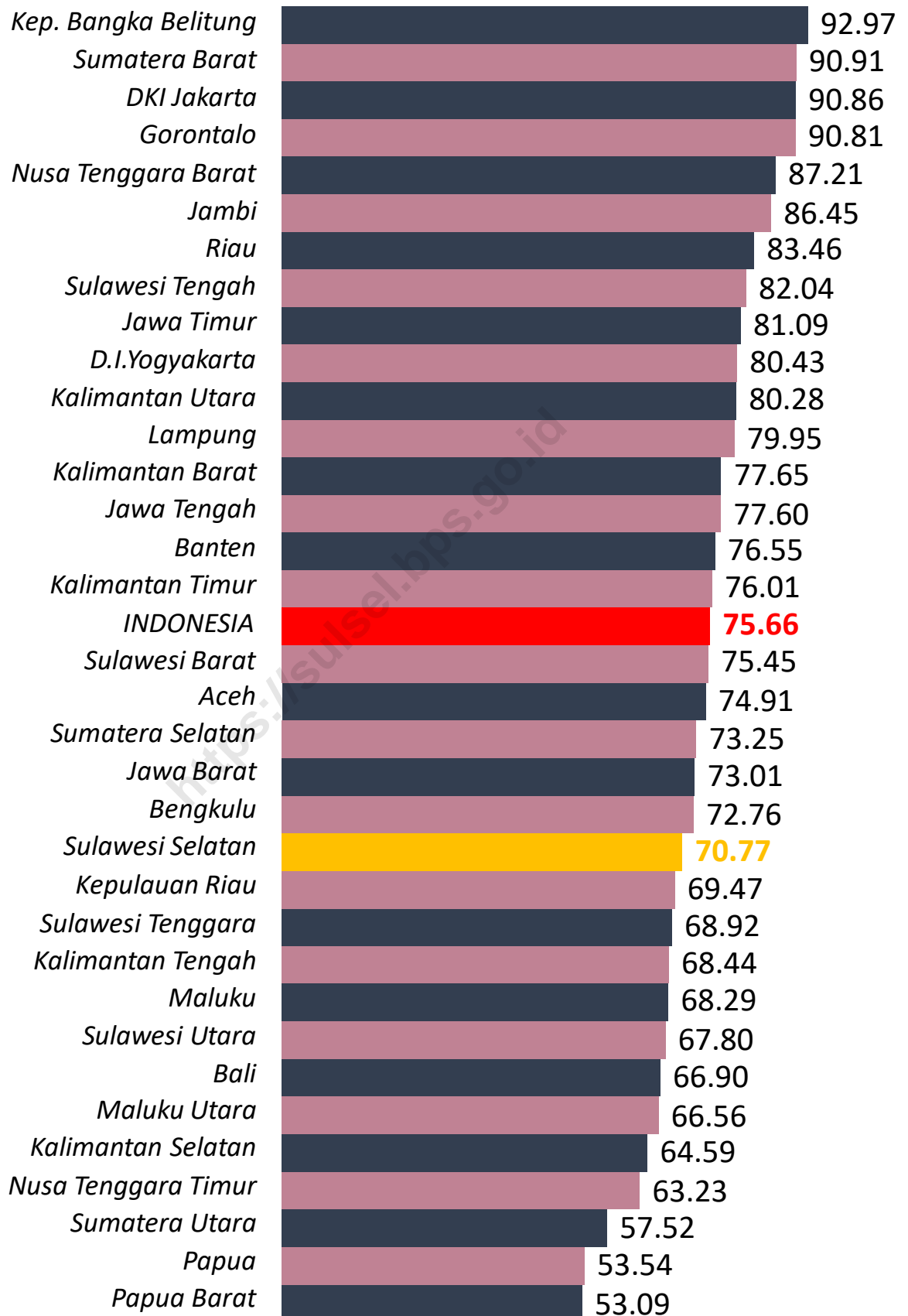
ASPEK 2 : HAK-HAK POLITIK





Gambar 3.5. Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2020

ASPEK 3 : LEMBAGA DEMOKRASI



4. INFOGRAFIS
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2020

PROVINSI SULAWESI SELATAN 2020
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SULAWESI SELATAN TAHUN 2020



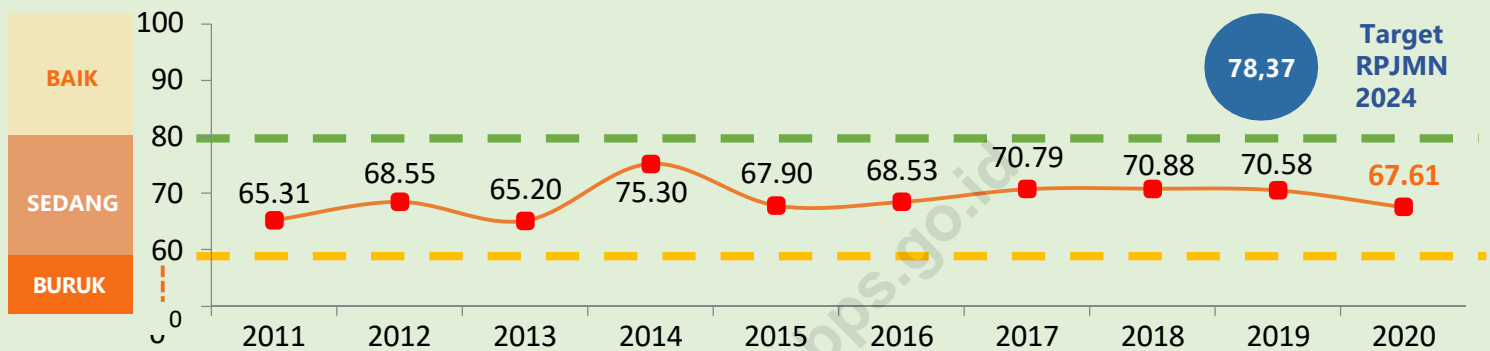
IDI 2020

67,61

Tingkat Demokrasi di Sulawesi Selatan secara umum masih dalam kategori **SEDANG**

Turun 2,97 poin

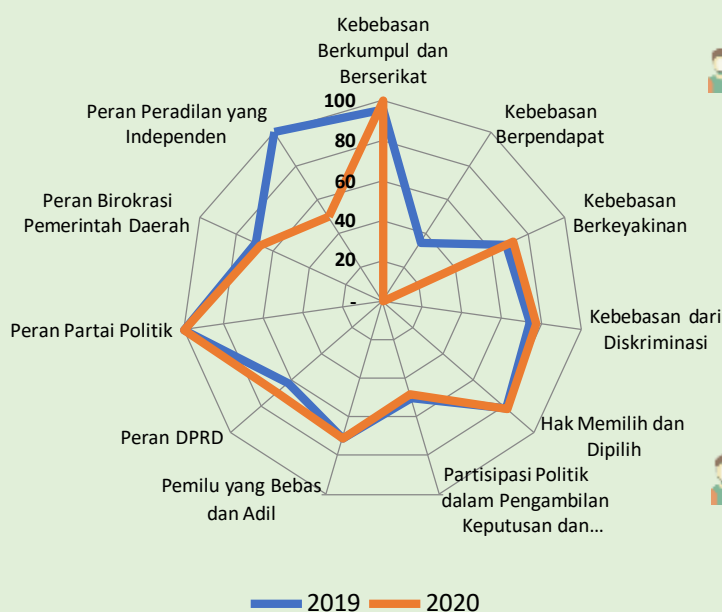
Perkembangan IDI 2011-2020



3 ASPEK IDI



11 VARIABEL IDI



Indeks Variabel yang Meningkat

Indeks variabel yang mengalami peningkatan:

- Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
- Kebebasan Berkeyakinan
- Kebebasan dari Diskriminasi
- Hak Memilih dan Dipilih
- Peran DPRD

Indeks Variabel yang Menurun

Indeks variabel yang mengalami penurunan:

- Kebebasan Berpendapat
- Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan
- Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
- Peran Peradilan yang Independen

Indeks Variabel yang Tetap

Indeks variabel yang tetap:

- Pemilu yang Bebas dan Adil
- Peran Partai Politik



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Haji Bau No. 6, Makassar 90125
Telp: (0411) 854838, Fax: (0411)851225
Homepage: <https://sulsel.bps.go.id>
Email : bps7300@bps.go.id

ISBN 978-623-6203-52-1 (PDF)

